B A B I V

SINGLE MAJORITY GOLKAR DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM

A. EKSISTENSI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI ISLAM

Seperti kita maklumi bersama, bahwa manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini, mempunyai hak otonomi. karena mempunyai hak otonomi itulah, manusia mempunyai hak pilih moral dan hak kemauan bebas dalam rangka mencari eksistensi kemanusiaannya. Eksistensi inilah yang harus mendapatkan pengakuan dari manusia yang lain, sebagai suatu persyaratan mutlak untuk menjadi manusia yang utuh dan paripurna. Eksistensi itu kita kenal sebagai hak-hak asasi manusia.

Islam, sebagaimana kita ketahui, sangat menjamin dan melindungi hak-hak asasi ini dari ancaman-ancaman dan usaha-usaha yang berusaha menghilangkan dari diri manusia. Sebab manusia dengan posisinya sebagai khalifah Allah di muka bumi diberikan kekuasaan (quddira lahu) untuk menciptakan peristiwa-peristiwa sejarahnya dengan kemauan dan ikhtiarnya, untuk tujuan negatif maupun tujuan positif. Sehingga menurut Syafii Maarif (1995: 19), maka terserah kepada manusia untuk merekayasa masa depan peradabannya, karena masa depan itu terbuka bagi semua umat manusia. Yang dihimbau Al Qur'an adalah agar mereka tetap hirau dengan prinsip-prinsip moral abadi yang me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mancar dari suatu kawasan tak terhingga yang berfungsi untuk menyinari gapaian manusia dalam mencari makna dan tujuan hidup sepanjang perjalanan sejarah.

Berpijak dari eksistensi manusia diatas, dalam korelasinya dengan status individu sebagai anggota masyarakat atau kelompok masyarakat dalam suatu negara, harus dihormati dan diberikan hak-hak asasinya sebagai warga negara yang utuh. Dalam artian lain, harus diberikan persamaan hak antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain dalam rangka berpartisipasi di semua bidang kehidupan, terlebih dibidang politik.

Seperti dijelaskan di dalam bab sebelumnya, bahwa tujuan negara Islam adalah mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban, serta membangun negara itu sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuannya itu demi kesejahteraan seluruh warga negara.

Dari sini bisa kita lihat, bahwa negara yang akan dibangun oleh Islam, adalah negara yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warganya untuk turut serta berpartisipasi dalam rangka membangun negaranya demi kesejahteraan dan kebahagian seluruh masyarakatnya. Selain itu, setiap anggota masyarakat diwajibkan turut serta memelihara kedaulatan dan keselamatan serta inte-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gritas negara atau persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga tidak dibenarkan setiap anggota negara melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, tidak terkecuali pemerintah atau penguasa. Bahkan penguasa yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang merugikan rakyat atau mematikan hak-hak rakyat yang dijamin oleh undang-undang. Karena hal itu termasuk khianat, dan akan diancam oleh Allah, sebagaimana firman-Nya :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ
دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ -
وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .

"Janganlah kamu seperti perempuan yang merusakkan benang yang dipintalnya, sesudah kokoh menjadi rusak kembali. Kamu jadikan sumpahmu untuk alat penipu diantara kamu, karena ada segolongan lebih banyak dari golongan yang lain. Hanya Allah mencoba kamu dengan dia. Nanti Allah akan menerangkan kepadamu pada hari kiamat, apa-apa yang telah kamu perselisihkan" (Q.S. 16:92).

Berpijak pada konsep Islam diatas, bisa diidentifikasikan dan dikomparasikan dengan prilaku politik demokrasi yang sedang berlangsung di negara kita, yang sering kita jumpai adanya penindasan-penindasan hak azasi manusia, dan bahkan mematikan prinsip demokrasi rakyat. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari eksistensi GOLKAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam percaturan perpolitikan di Indonesia.

Sebagaimana disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa eksistensi GOLKAR sebagai kekuatan politik yang ada dan hidup di negara kita ini, tidak malah memberikan warna positif dalam kehidupan politik bangsa, malah sebaliknya, dengan adanya GOLKAR terjadi depolitisasi yang dilakukan pemerintah dalam semua aspek kehidupan. Hal ini disebabkan karena GOLKAR merupakan salah satu kekuatan utama pemerintah Orde Baru, dalam rangka mengamankan dan mempertahankan status quo pemerintah ORBA. Sehingga disetiap kesempatan, terutama dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, GOLKAR selalu mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus dari pemerintah yang menguntungkan posisinya. Dari sini dapat dikatakan, bahwa GOLKAR tidak lagi disebut sekedar the ruling party atau partai yang sedang memerintah, tetapi lebih jauh sebagai the government's party atau partai pemerintah.

Dari prilaku politik diatas, jelas bagi kita bahwa prinsip-prinsip yang sangat esensi bagi demokrasi belum dilaksanakan di negara kita ini. Dalam alam negara demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat yang mempunyai hak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijakan umum atau public policy, harus benar-benar dihormati dan dijalankan oleh semua anggota negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, pemerintahan yang diinginkan bukan pemerintahan yang dipimpin oleh segolongan atau kelompok tertentu saja, namun dikuasai oleh seluruh masyarakat muslim, dengan berlandaskan kepada norma-norma dan nilai-nilai Islam sebagai dasar pemerintahannya. Sehingga dengan tuntunan syari'at itu, dapat diwujudkan suatu ummat dan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat manapun atau ummat manapun pada setiap zaman dan tempat. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al Qur'an :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ .

"Orang-orang yang berjuang dalam (menunaikan hak) Kami niscaya Kami tunjuki mereka ke jalan Kami. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang memperbuat kebaikan (Q.S. 29:69).

Dalam Islam, pemerintah atau pemimpin tertinggi negara bukanlah sumber kekuasaan. Tetapi ia hanyalah wakil ummat untuk menangani kepentingan agama dan dunia, selaras dengan syari'at Allah dan Rasul-Nya. . Sehingga sumber kekuasaan itu terletak pada ummat itu sendiri. sehingga bila khalifah berbuat salah, ummat mempunyai hak untuk menasehati, meluruskan dan mengoreksi, atau bahkan memecat bila terdapat alasan yang sah. Ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi dan memandang bahwa partisipasi masyarakat atau warga negara merupakan hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling esensi dalam membentuk pemerintahan yang demokrasi.

Terhadap kebebasan melakukan kontrol sosial ini, Islam tidak hanya menganjurkan tetapi mewajibkan kepada setiap ummatnya. Sebab menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran (kejahatan), merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan, yang kedudukannya sama dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

"Mereka itu apabila Kami berikan kedudukan (kekuasaan) di muka bumi, senantiasa menegakkan shalat dan membanyar zakat, dan mereka menyuruh dengan yang makruf dan melarang dari yang munkar" (Q.S. 22:41).

Jadi eksistensi GOLKAR sebagai salah satu unsur dalam lembaga ahlul halli wal aqdi atau DPR, seharusnya menjadi lembaga korektif atas prilaku penguasa atau pemerintah. Sebab salah satu fungsi dari lembaga ini adalah alat pengontrol pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Namun kenyataan yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi adalah GOLKAR menjadi kekuatan politik pemerintah, yang dijadikan alat penguasa untuk mengamankan dan mempertahankan status quonya. Padahal sebagai kekuatan politik, GOLKAR mempunyai kedudukan yang sama dengan partai politik yang lain, PPP dan PDI. Sehingga dengan eksistensi GOLKAR yang semacam ini, akan tercipta kekua-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saan monolitik yang diharamkan Islam. Sesuai firmanNya:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ.

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, maka kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan dituli kanNya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka" (Q.S. 47:22-23).

Ayat diatas memperingatkan kepada kita, bahwa konsentrasi kekuasaan yang bertumpuk ditangan penguasa, biasanya akan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sebagaimana penjelasan ayat diatas merupakan watak manusia yang diberi amanah kekuasaan.

Umat Islam harus mencegah penguasa yang tirani ini dan sekaligus membela orang-orang yang teraniaya. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قَالَ: أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ تَحْجُزُهُ عَنْ ظُلْمِهِ فَذَلِكَ نَصْرُهُ.

"Tolonglah saudaramu, baik yang menganiaya maupun yang teraniaya. Salah seorang sahabat bertanya: "Aku senantiasa menolong yang teraniaya, tetapi bagaimanakah harus aku menolong orang yang menganiaya?" Rasulullah saw. bersabda: "Engkau halangi (cegah) dia dari perbuatan yang aniaya, begitulah cara menolongnya"

إِنَّ الْفَاجِرَ إِذَا مَاتَ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.

"Sesungguhnya apabila seorang penguasa tirani mati, maka tentramlah rakyat banyak, dan negeri, tumbuh-tumbuhan, dan hewan (binatang-binatang)" (HR. Bukhari-Muslim).

Kiranya tidak berlebihan bila kita berpedoman dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkiblat pada perkataan Umar bin Khatab di depat orang banyak : "Demi Allah, aku sama sekali bukan seorang raja sehingga dengan kekuasaan dan tiraninya akan memperbudak kalian. Aku sama seperti halnya salah seorang diantara kalian. Kedudukanku terhadap kalian adalah seperti kedudukan seorang wali anak yatim yang memelihara diri dan hartanya!

Perkataan Umar diatas, menegaskan kepada kita bahwa penguasa atau pemerintah pada hakekatnya adalah wali bagi seluruh warga negaranya. Bukan wali bagi segolongan atau sekelompok saja. Untuk itu pemerintah dituntut memberikan perhatian dan kedudukan yang sama kepada semua warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat.

Dalam bidang pembangunan politik, tidak dibenarkan pemerintah menjadikan GOLKAR sebagai partai pemerintah, sehingga berusaha memenangkan GOLKAR di setiap pemilihan umum. Di sini, pemerintah dituntut untuk menjadi wasit yang benar-benar bersih dan adil. Karena tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana undang-undang di satu sisi, dan GOLKAR sebagai unsur dalam lembaga ahlul halli wal aqdi yang membuat undang-undang di sisi lain, saling bersebrangan. Sehingga bila terjadi dualisme kepentingan dalam satu lembaga, legislatif, yang terjadi adalah ketimpangan dalam menjalankan tugas dan tanggung-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawabnya, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya undang-undang yang dilakukan pemerintah.

Karena dengan tidak berjalannya fungsi lembaga legislatif sebagai alat kontrol pemerintah, akan menciptakan kekuasaan pemerintah yang tidak terbatas. Ini berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang menjadikan undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam Islam, konstitusi negara bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan sepenuhnya dalam artian diberlakukan secara efektif. Dalam kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Yaitu meletakkan prinsip persamaan dalam hukum dengan bersikap adil didalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum bagi semua warga negara, tanpa mengenal diskriminasi apa pun baik kepada individu maupun golongan masyarakat.

B. DOMINASI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEMOKRASI ISLAM

Nilai-nilai asasi dalam Islam yang harus dihormati oleh setiap manusia tanpa terkecuali, seperti dikemukakan dalam bab sebelumnya, ialah persamaan hak, kedudukan dan kesempatan sebagai pelaksana undang-undang, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan tidak saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah, kesesuaian antara individu dan masyarakat serta negara dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sasaran yang satu.

Islam tidak membedakan ummat manusia atas jenis kelamin, asal usul etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Diskriminasi dan segregasi (pengasingan) adalah musuh Islam yang harus di basmi. Yang diinginkan Islam adalah terciptanya hubungan keseimbangan antara individu dan negara, sehingga tidak menjadikan negara sebagai penguasa mutlak yang dapat berbuat apa saja terhadap rakyat.

Berdasarkan konsep Islam di atas, dalam hubungannya dengan dominasi GOLKAR, sebagai kekuatan mayoritas dalam pemerintahan maupun dalam lembaga legislatif (DRR) di Indonesia. Tidak diperbolehkan menghilangkan salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai asasi itu. Karena dengan menghilangkan nilai-nilai asasi di atas, berarti menghilangkan kodrati manusia sebagai warga negara. Dan ini termasuk diskriminasi dan penindasan terhadap hak-hak rakyat yang dijunjung tinggi oleh hukum.

Eksistensi golongan-golongan atau partai-partai di akui dalam Islam, karena ditopang oleh ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini juga dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara pada zaman Khulafaur Rasyidin. Secara Qur'ani, pengakuan eksistensi golongan atau partai dalam masyarakat atau negara Islam, dituangkan dalam firmanNya surah Al-Hujurat: 11 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا
مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ
يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu golongan (kaum) mengolok-olokan golongan (kaum) yang lain, karena boleh jadi mereka (yang didok-olokkan itu) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan); dan jang anlah mereka (wanita-wanita) mengolok-olokkan wanita - wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang di olok-olokkan) lebih baik dari pada wanita-wanita (yang mengolok-olokkan), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang- orang yan zalim" (Q.S. 49:11).

Muhammad Ali Shabuni dalam mengomentari ayat ini, antara lain menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, - yaitu kamu yang telah disifatkan dengan iman, dan membenarkan dengan Kitab Allah dan Rasul-Nya, janglanlah me - rendahkan satu jamaah (golongan) dengan jemaah (golongan) yang lain, dan janganlah seseorang kamu memperolok-olok seorang yang lain, sesungguhnya mereka yang rendah atau direndahkan itu umumnya lebih baik pada sisi Allah dari pada mereka yang merendahkan (Shabuni, 1981: 235).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil ke - simpulan bahwa eksistensi setiap golongan (partai) baik muslim maupun non muslim, di dalam kehidupan masyarakat, dibenarkan dan diakui keberadaannya. Larangan yang dia -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tur dalam ayat diatas, janganlah golongan-golongan itu saling menghina, merendahkan dan menjegal satu dengan lainnya di dalam kehidupan masyarakat (Djaelani, 1995: - 199).

Dalam praktek penyelenggaraan negara, para Khulafaur Rasyidin selalu konsisten dengan konstitusi negara Islam pertama, yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw. Keanggotaan majelis syura juga senantiasa terdiri atas dua golongan mayoritas, yakni golongan Muhajirin dan golongan Ansar (Djaelani, 1995: 201).

Lalu bagaimanakah hubungannya dengan praktek dominasi yang dilakukan GOLKAR di dalam pemerintahan maupun di lembaga legislatif atau DPR?.

Sebagai salah satu kekuatan politik yang mayoritas dan selalu memenangkan di setiap pemilihan umum. GOLKAR tidak dengan sendirinya mendominasi keseluruhan atas jabatan-jabatan di pemerintahan maupun dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di dalam DPR. Karena hal itu termasuk prilaku tirani dari mayoritas kepada minoritas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang akan ditegakkan Islam.

Dalam hal menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta kesewenang-wenangan ini, telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ .

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah tahu siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-RasulNya padahal Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa" (Q.S. 57:25).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .

"Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah" (Q.S. 3:110).

Dari ayat-ayat diatas, dapat diketahui bahwa tujuan negara yang akan dipertahankan oleh Islam tidak hanya mempertahankan kemerdekaan negara atau keutuhan negara (persatuan dan kesatuan) dan mencegah permusuhan antara golongan yang satu dengan yang lain (stabilitas politik) saja. Melainkan juga mempunyai tujuan yang sangat tinggi yaitu memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat berdasarkan Kitab Allah, dan upaya mencegah yang munkar, serta menjebol segala macam kejahatan (tirani) sampai ke akar-akarnya (Hamidullah, dkk, 1987: 39).

Di sini jelas, bahwa dominasi GOLKAR di dalam pemerintahan dan legislatif, dengan alasan persatuan dan kesatuan atau stabilitas politik, atau yang lainnya, ti-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dak dibenarkan dalam Islam. Karena dengan adanya dominasi ini, berarti telah menghilangkan partisipasi dan eksistensi yang lain.

1. DOMINASI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF PRINSIP SYURA

Seperti penjelasan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting. Oleh karena itu penentuan kebijakan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan kepada kesepakatan musyawarah. Karena itu, musyawarah juga merupakan prinsip penting dalam sistem politik Islam.

Sehingga merupakan suatu keharusan bagi pemimpin negara serta para pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridaan mereka, mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah. Kedudukan musyawarah dalam sistem politik dan pemerintahan tersebut harus berlandaskan kepada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, saling percaya mempercayai, serta bertujuan konstrukfif dan menguntungkan bagi kemaslahatan ummat.

Dalam Islam, lembaga syura mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri. Artinya, lembaga ini diberi keleluasaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak manapun. Tidak terkecuali pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi syura bukanlah berarti bahwa seseorang meminta nasehat kepada orang lain, melainkan nasehat timbal balik melalui diskusi bersama. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa kepala eksekutif tidak dapat sama sekali menolak keputusan yang diambil melalui syura, atau tidak diperbolehkan merekayasa keputusan-keputusan dalam lembaga ini dengan cara apapun.

Sehingga di dalam sistem negara Islam, pemilihan anggota-anggota badan legislatif dijadikan prinsip dasar yang telah diatur dalam syari'at. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ .

"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka" (Q.S. 42:38).

Dari isi ayat tersebut, ungkapan "diantara mereka" dalam ketentuan Al Qur'an yang disebutkan diatas menunjukkan seluruh jamaah (rakyat). Karena itu majelis syura atau DPR, seharusnya sungguh-sungguh mewakili seluruh rakyat, baik pria maupun wanita (Djaelani, 1995: 197).

Dari sini bisa kita analisa, bagaimana eksistensi dari dominasi GOLKAR di dalam DPR. Karena hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sangat mempengaruhi eksistensi DPR sebagai lembaga syura atau legislatif yang bertanggungjawab membuat undang-undang, dan sekaligus mengangkat khalifah yang akan menjalankan undang-undang. Sedangkan GOL - KAR yang merupakan unsur kekuatan politik yang ada di dalamnya, mempunyai suara yang mayoritas.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa seba - gai kekuatan politik yang memenangkan pemilu, GOLKAR mempunyai kedudukan mayoritas di DPR, mulai dari pusat sampai daerah di lembaga ini, GOLKAR tampaknya selalu mendominasi keputusan-keputusan yang diambil dan jabatan yang ada. Padahal kita ketahui pula, bahwa ia (GOLKAR) adalah merupakan salah satu kekuatan politik pemerintah ORBA, selain ABRI. Artinya, eksistensi GOL KAR di dalam lembaga ini selain menyuarakan aspirasi kepentingan rakyat, juga sebagai wakil pemerintah yang berusaha untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan pemerintah. Disinilah kerancuan standar ganda dari eksistensi dominasi GOLKAR di lembaga ini. Sebab bila dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat di satu sisi, dan kepentingan pemerintah disisi lain, selalu yang diuntungkan adalah kepentingan pemerintah.

Padahal kalau kita merujuk kepada ketentuan Al Qur'an (Q.S. 42: 38). Bahwa sebagai salah satu unsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam majelis syura, wajib bagi GOLKAR membela serta menyuarakan aspirasi kepentingan seluruh rakyat. Sebab kemenangan GOLKAR dalam setiap pemilu merupakan ekspresi dari kepercayaan dan amanat yang diberikan rakyat. Sedangkan orang yang mengingkari amanat adalah khianat, dan khianat di larang dalam Islam.

Larangan berbuat khianat ini, disinyalir oleh Allah dalam firmannya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

"Sesungguhnya Allah menyuruh, supaya kamu membayar amanat kepada yang empunya, dan apa bila kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan keadilan. Sesungguhnya Allah sebaik-baik mengajarkan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S. 4:58).

2. DOMINASI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN

Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangan. Sehingga keadilan yang ingin ditegakkan Islam dan dipandang sebagai salah satu dasarnya yang kuat adalah keadilan yang utama bagi setiap orang walaupun berbeda bangsa dan agama.

Perintah berbuat adil ini diterangkan oleh-Nya dalam Al Qur'an surah An-Nahl ayat 90:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Q.S. 16:90).

Prinsip keadilan dalam Islam merupakan sistem keadilan yang sifatnya menyeluruh, baik dalam keadilan ekonomi, politik, sosial, maupun keadilan dibidang bidang yang lainnya. Artinya, bahwa keadilan itu merupakan keinginan setiap manusia dimanapun ia berada dan menjalankan aktifitasnya.

Begitu pula prinsip keadilan harus dibangun di dalam pemerintahan maupun legislatif. Dalam artian, rekrutmen jabatan di pemerintahan maupun di legislatif harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan, tidak memandang golongan yang satu lebih berhak dari lainnya atau lebih utama dari lainnya.

Islam memandang manusia mempunyai persamaan hak di dalam pemerintahan maupun di dalam legis-latif, maka dari itu tidak di-benarkan adanya pembeda-bedaan kesempatan kepada setiap warga negara atau golongan tertentu. Karena hal tersebut merupakan penindasan atas hak asasi manusia yang paling hakiki. Sedangkan dalam negara hukum, hak-hak asasi manusia sangat di lindungi oleh undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dominasi GOLKAR di dalam pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah, dari eselon paling atas sampai paling bawah, merupakan tindakan yang tidak di benarkan oleh undang-undang, lebih-lebih dalam Islam. Karena tindakan itu menutup sama sekali kesempatan bagi masyarakat atau kelompok yang lainnya untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara.

Alasan bahwa KORPRI adalah organisasi kekaryaan yang berafiliasi ke GOLKAR atau mengaspirasikan politiknya ke GOLKAR, berimplikasi menciptakan permusuhan antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Karena pada prinsipnya pemerintahan yang diinginkan Islam tidak di dominasi oleh sekelompok atau segolongan saja, tetapi oleh seluruh warga negara. Islam tidak menghendaki adanya pengkotak-kotakan di dalam masyarakat, karena pengkotak-kotakan itu akan melemahkan integritas suatu pemerintahan, yang akhirnya akan menjerumuskan pemerintahan itu dalam kehancuran. Dan tingkah laku dominisasi GOLKAR di semua lembaga-lembaga pemerintahan sekarang ini sudah menjurus pada pemerintahan "monolotik", yang mendorong terciptapemerintahan yang otoriter dan totaliter.

Prilaku politik di atas tidak mencerminkan prilaku politik yang rasional. Padahal ketentuan syariat Islam yang menjadi tuntunan otomatis bagi kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkannya suatu ummat dan pemerintahan, berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang rasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat manapun dan ummat manapun pada setiap zaman dan tempat.

Karena itulah, Islam melarang ummatnya membuat undang-undang atau hukum sesuai dengan kehendak hatinya. Tetapi telah diberikan bekal dari syariat Allah yang dijamin kebenarannya serta kemaslahatannya bagi sekalian alam. Sebagai mana firmannya:

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ .

"(Qur'an) ini adalah keterangan bagi manusia, jadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang taqwa" (Q.S. 3:138).

Islam melarang adanya usaha-usaha dari salah satu golongan (kekuatan politik) melakukan penjegalan terhadap golongan lainnya (Q.S. 49:11), sehingga eksistensi golongan itu di masyarakat terputus atau tidak ada sama sekali.

Dari ayat diatas, bisa dijadikan sandaran bagi tidak diperbolehkannya pihak-pihak tertentu (pemerintah) melakukan atau membantu usaha-usaha untuk membela golongan tertentu dalam proses pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam bidang politik. Seperti membantu kemenangan GOLKAR di setiap pemilu, atau mengeluarkan ketetapan atau peraturan yang menguntung-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan posisi GOLKAR; seperti konsep massa mengambang dan penekanan politik terhadap PNS melalui wadah KORPRI. Pada prinsipnya, Islam tidak memperbolehkan terciptanya superioritas satu kelompok atau golongan terhadap kelompok atau golongan yang lain.

3. DOMINASI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF PRINSIP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR.

Dalam rangka kelangsungan hidup manusia sebagai individu dalam masyarakat, Islam memberikan hak dan membebankan kewajiban kepada ummatnya. Sehingga manusia berusaha memenuhi dan mendapatkan hak-haknya itu, sekaligus berusaha dan melaksanakan kewajiban yang telah diembannya. Salah satu perintah itu adalah menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah segala bentuk kemun-karan.

Anjuran Islam ini, adalah untuk menjaga dan memelihara hukum-hukum syari'at dan dalam usahanya memelihara berlangsungnya penerapan hukum. Sehingga terciptа masyarakat yang adil dan sentosa dalam ridha dan bimbingan Allah swt.

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini (Q.S.3:104) seharusnya dijadikan landasan bagi lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga pengontrol dan pengawas terlaksananya undang-undang di masyarakat. Karena tanpa menjadikan prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sebagai landasan dalam operasionalnya, bisa dijamin lembaga ini tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Adanya dominasi-dominasi yang bermuara pada kepentingan kelompok, membuktikan bahwa lembaga ini belum berlandaskan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan belum tercipta suatu ikatan yang mengikat serta menghimpun anggotanya dalam mencari kebaikan.

Sehingga adanya dominasi GOLKAR di DPR dalam menetapkan suatu keputusan atau undang-undang, membuktikan kepada kita, bahwa lembaga legislatif atau DPR di negara ini belum berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh UUD 1945. Tetapi mereka hanya dijadikan alat penguasa untuk meligitimasikan cengkraman kekuasaan - nya, melalui peran GOLKAR yang mempunyai suara mayoritas di dalam lembaga ini.

Jadi ditinjau dari prinsip ini, eksistensi dominasi GOLKAR di DPR jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita Islam. Karena dengan mendominasi suara di DPR, secara tidak langsung menghalang-halangi atau bahkan mematikan keinginan baik golongan atau partai yang lain dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan menegakkan kebenaran, serta mencegah penguasa atau peme - rintah dari kemunkaran. Karena eksistensi GOLKAR disini sebagai partai pemerintah yang ada dalam DPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal prinsip demokrasi dalam Islam yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia itu adalah keadilan dan kebebasan. Yaitu kebebasan untuk mengontrol, mengkritik- pokoknya mencegah kemunkaran dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia yang lain, serta kebebasan melakukan dan mengusulkan yang ma'ruf.

Sedangkan musyawarah yang dilakukan secara kelembagaan (legislatif) maupun tidak, yang bertujuan untuk suatu kejahatan maupun melindungi kemunkaran atau kejahatan yang ada, sangat dilarang dalam Islam . Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah: 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ .

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik, maka janganlah berbisik-bisik dengan dosa, aniaya dan mendurhakai Rsul, dan berbisiklah dengan kebaikan dan taqwa. Takutlah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu dihimpun" (Q.S. 58:9).

4. DOMINASI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERSAMAAN

Dalam Islam, prinsip persamaan berarti setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama, yaitu persamaan dalam mendapatkan kebebasan, tanggungjawab, dan tugas-tugas kemasyarakatan. Sehingga Islam tidak mengenal pembedaan ummat manusia atas jenis kelamin, asal usul etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara yang dibangun atas dasar ajaran Islam , harus berlandaskan asas persaudaraan diantara semua umat manusia, karena Islam memandang negara sebagai suatu keluarga besar yang tiap anggotanya harus saling menghormati atas dasar cinta. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

"Orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, sebab itu perdamaikanlah antara dua orang saudaramu, dan takutlah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat" (Q.S. 49:10).

Dari sini jelas, bahwa prinsip persamaan yang diinginkan Islam adalah prinsip persamaan atas individu maupun golongan atau kelompok di dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali atas persamaan hak dalam berpolitik dan kedudukan di dalam pemerintahan dan legislatif. Sehingga dalam prinsip persamaan Islam ini tidak di benarkan adanya superioritas dan dominasi di dalam aspek kehidupan masyarakat.

Termasuk dominasi Golkar di lembaga legislatif maupun di dalam pemerintahan, sangat bertentangan dengan prinsip persamaan dalam Islam ini. Karena fungsi Islam sebagai rahmatan lil'alamin, tidak mengenal adanya diskriminasi-diskriminasi dalam bentuk apapun, sehingga tercipta ummat yang aman, damai dan sentosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dominasi GOLKAR dalam sistem perpolitikan di Indonesia, menunjukkan kurang dan bahkan tidak berjalannya persamaan hak individu dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh UUD 1945. Ini berarti secara implisit menunjukkan bahwa pemerintah ORBA belum menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, terutama dalam kehidupan berpolitik.

Hal diatas, bisa kita saksikan komposisi jabatan birokrasi yang ada, dari tingkat pusat seperti pejabat tinggi (Menteri, DPA, MA), sampai kepada Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa, di pegang oleh GOLKAR. Bahkan Presidan dan para Menteri menjabat sebagai ketua pembina dan para pembina dalam DPP GOLKAR.

Dari sini secara tidak langsung, ORBA telah terjebak pada monolitik kekuasaan, yang sangat berbahaya bagi stabilitas dan pembangunan politik bangsa . Karena pemerintahan yang monolitik akan membawa kepapemerintahan yang diktator dan tirani. Dan pemerintahan yang diktator akan membawa kepada pemberontakan , dan pemberontakan akan membawa kepada kehancuran.

Jadi pemerintahan yang demokratis dengan sendirinya akan menghasilkan masyarakat yang demokratis pula. Tetapi pemerintahan yang demokratis harus bersandar kepada kekuasaan yang bersumberkan kemauan, kemampuan dan pengetahuan masyarakatnya. Oleh karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap pemerintahan yang demokratis akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warganya dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dalam masyarakat demokratis muncul kesadaran bahwa kekuasaan akan aman kalau berada di tangan rakyat sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id